




Research Article

Model Transparansi dan Akuntabilitas Biaya Pendidikan di MI Manba'ul Huda

Ara Hidayat¹, Asri Sulastris², Femi Sri Wahyuni³

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: arahidayat@uinsgd.ac.id 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: astrimiastry@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: femisri.mpi@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025
Available online : December 11, 2025

How to Cite: Ara Hidayat, Asri Sulastris and Femi Sri Wahyuni (2025) "Transparency and Accountability Model for Education Costs at MI Manba'ul Huda", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1876-1887. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1865.

Transparency and Accountability Model for Education Costs at MI Manba'ul Huda

Abstract. Effective financial management can support the quality of education. Well-managed finances are those that implement transparency and accountability. This is crucial because financing is a crucial factor and influences educational activities. This research is a field study using descriptive qualitative methods to explain the transparency and accountability model at MI Manba'ul Huda in Bandung City. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicate that the transparency and accountability model has been implemented at the madrasah, but challenges remain in managing educational costs.

Keywords: Transparency, Accountability, Education Costs

Abstrak. Pengelolaan pembiayaan yang efektif dapat mendukung kualitas pendidikan. Keuangan yang dikelola dengan baik adalah yang menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting karena pembiayaan menjadi faktor penting dan berpengaruh pada aktivitas pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan model transparansi dan akuntabilitas di MI Manba'ul Huda Kota Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan di madrasah tersebut namun masih terdapat tantangan dalam pengelolaan biaya pendidikan.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Biaya Pendidikan

PENDAHULUAN

Peran strategis pendidikan sebagai upaya untuk membangun bangsa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Agar sumber daya manusia ini dapat dinilai berkualitas maka untuk mencapai tujuan tersebut lembaga pendidikan termasuk di dalamnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) perlu dilakukan model pengelolaan pendidikan yang selain transparan juga dapat dipertanggung jawabkan atau akuntabel. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen maupun pengelolaan pembiayaan pendidikan ialah untuk membangun kepercayaan yang dijalin antara pihak lembaga pendidikan dengan beberapa pihak seperti orang tua dari peserta didik, kemudian para pendidik, dan juga pemerintahan.

Pembiayaan sebagai system pengelolaan pendidikan yang diharapkan mampu mengelola dana pendidikan secara efektif dan efisien. Baik keuangan dan pembiayaan ialah sebagai salah satu indicator yang mendukung pengelolaan pendidikan. Pada penerapannya, pembahasan mengenai biaya pendidikan ini harus dilaksanakan secara transparan melalui perencanaan yang matang, selanjutnya dilakukan sesuai kebutuhan, dan dilakukan evaluasi serta harus mampu mempertanggung jawabkan pengelolaan biaya secara terbuka, di mana hal tersebut sebagai penentu dari capaian tujuan pendidikan yang membutuhkan dana atau anggaran dari beberapa pihak seperti pemerintah maupun masyarakat¹.

MI Manba'ul Huda sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama yang berfokus pada pengajaran berbasis ajaran keagamaan khususnya Islam kemudian dihadapkan dengan sebuah tuntutan untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Mengingat tingginya kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya transparansi dalam penggunaan dana pendidikan hal ini dirasa relevan dengan diberlakukannya transparansi serta akuntabilitas yang diterapkan pada lembaga

¹ Aulia Riski, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia," 2019, 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/2pcs4>.

pendidikan. Se jauh ini dana pendidikan yang didapat oleh lembaga yaitu bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SPP, maupun sumber lainnya.

Pengalaman kurang baik dari sector pendidikan mengenai penggunaan pembiayaan yang kurang transparan, dan sampai saat ini transparansi dalam pengelolaan biaya dinilai masih rendah. Orang tua dari peserta didik masih ada yang kesulitan bahkan tidak memiliki akses terhadap informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana pendidikan. Hal tersebut dapat memicu konflik antara pihak lembaga dengan masyarakat dan akan menimbulkan penurunan kepercayaan. Saat ini pembahasan mengenai transparansi serta akuntabilitas pembiayaan khususnya dalam bidang pendidikan memang telah banyak dilakukan penelitian. Namun penelitian ini lebih spesifik kepada lembaga pendidikan yang berbasis ajaran Islam, dengan karakteristik yang dimiliki oleh madrasah menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut sekaligus agar dapat melakukan pengembangan mengenai model transparansi serta akuntabilitas yang relevan dengan kebutuhan lembaga pendidikan berbasis agama.

Adapun pada penelitian ini lebih mengintegrasikan pada prinsip tata kelola madrasah yang baik dengan ditandai oleh adanya keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, serta keefektifan dalam pengelolaan biaya pendidikan. Bagaimana pada penelitian ini juga berusaha untuk menyajikan solusi yang dapat diaplikasikan di lembaga pendidikan khususnya MI Manba'ul Huda selain itu juga dapat menjadi referensi dalam mengembangkan transparansi dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini peneliti pilih dengan rasionalisasi bahwa peneliti mampu menggali data dan informasi secara lebih mendalam mengenai pembahasan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan di MI Manba'ul Huda. Pada tahap ini yang menjadi subjek penelitian yaitu kepala madrasah, pendidik, bendahara madrasah, kemudian orang tua dari peserta didik yang diwakilkan oleh komite madrasah. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di mana hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 yang menekankan bahwa pembiayaan pendidikan ialah hubungan yang saling berkaitan yang di dalamnya terdiri dari beberapa komponen di mana komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda akan tetapi memiliki tujuan yang sama serta bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan.

Biaya pendidikan ialah seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan uang maupun bukan uang sebagai wujud rasa tanggung jawab seluruh pihak (masyarakat, orang tua, pemerintah) terhadap pembangunan Pendidikan mencapai tujuan

pendidikan yang diinginkan membuahkan hasil secara efektif dan efisien. sebagai wujud rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan, tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan, mendatangkan efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Ada jenis-jenis biaya pendidikan yang dikaji dalam pembiayaan pendidikan yaitu direct cost ialah biaya langsung dapat diartikan dengan biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Misalnya, adanya pembiayaan untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar mengajar. Jenis biaya lain yang termasuk ke dalam bagian dari biaya langsung adalah recurrent cost atau biaya rutin. Biaya ini biasa digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya rutin juga biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu rata-rata gaji guru per tahun, ratio guru, murid, dan proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin, biaya pembangunan atau dalam istilah lain capital cost².

Bicara tentang pembiayaan pada hakikatnya dalam pembiayaan pendidikan terdapat 4 model yaitu subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, pendidikan gratis yang disalurkan kepada peserta didik dengan usia tertentu, pendidikan gratis untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA), serta pendidikan tinggi yang tetap harus membayar uang bulanan atau SPP meskipun pada statusnya ia menerima subsidi, seluruh jenjang pendidikan yang wajib membiayai diri sendiri³.

Peran biaya tidak dapat dihiraukan begitu saja karena tanpa adanya biaya pendidikan maka tidak akan berjalan proses pendidikan tersebut. Pada tingkat lembaga pendidikan sumber dana itu didapat dari subsidi pemerintah baik pusat maupun daerah, iuran siswa atau bahkan berasal dari sumbangan masyarakat sekitar. Namun pada saat ini lembaga pendidikan mendapatkan subsidi dana pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat, sementara pada lembaga pendidikan swasta berasal dari yayasan⁴.

Pengertian Transparansi dan Akuntabilitas dalam Konteks Pendidikan

Dunia pendidikan di zaman sekarang tentu tidak bisa dilepaskan dari biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan komponen yang dianggap penting dalam menunjang proses keberlangsungan kegiatan pendidikan. Anggapan penting tersebut terkait dengan kegiatan pendidikan di madrasah seperti kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan dan kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya selalu membutuhkan biaya dalam proses keberlangsungannya, agar kegiatan-kegiatan tersebut tercapai secara optimal.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 telah mengatur substansi pendanaan pendidikan, yaitu:

² Zulfahmi Syukri Zarkasyi, "Akuntansi Biaya: Konsep Dasar Perhitungan Pembiayaan Pendidikan," *ANTOLOGI PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM*, n.d., 91.

³ W P Ferdi, "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 19, no. 4 (2013): 567, <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>.

⁴ Inten Nurmalasari, Zamzam Lukmanul Jamil, and Ara Hidayat, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Di Bandung," *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.26594/dirasat.v5i1.1626>.

- a. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat.
- b. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- c. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- d. Pengelolaan dana pendidikan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat harus dilandasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana pendidikan tersebut dibelanjakan.

Perspektif akuntansi mewajibkan setiap kepala madrasah untuk menyampaikan laporan keuangan madrasah kepada komite madrasah, pemerintah dan stakeholder lainnya. Laporan keuangan ini melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah. Hal tersebut akan menjamin adanya suatu akuntabilitas publik, terutama untuk pengguna dana pendidikan⁵. Manajemen keuangan madrasah bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan dari madrasah serta menciptakan suatu mekanisme pengendalian yang sesuai untuk pengambilan suatu keputusan keuangan.

Menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan madrasah membutuhkan partisipasi dan perhatian serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, salah satunya adalah partisipasi masyarakat yang memerlukan adanya akses untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran dana bantuan operasional madrasah, sehingga masyarakat sebagai orang tua peserta didik dapat melakukan fungsi pengawasan⁶.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek-aspek yang tidak bisa terlepas dalam pengelolaan keuangan. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*open process*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi⁷. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut pendapat dari Sulistoni dalam Widilestariningtiyas dan Permana mengemukakan bahwa transparansi merupakan prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat yang semakin sehat karena:

- a. tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengetahui, menganalisis dan mempengaruhi kebijakan.

⁵ Ria Yunita and Luh Putu Virra Indah Perdanawati, "Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Min) Klungkung," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium* 6, no. 2 (2020): 238-53, https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v6i2.434.

⁶ Marinah Marinah, Muhammad Ruslan Abdullah, and Mahadin Saleh, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Sekolah," *Kelola: Journal of Islamic Education Management* 8, no. 1 (2023): 79-92, <https://doi.org/10.24256/kelola.v8i1.3746>.

⁷ Marinah, Abdullah, and Saleh.

- b. transparansi memberi kesempatan aktor di luar eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan memberi perspektif berbeda dan kreatif dalam debat anggaran.
- c. Melalui informasi, legislatif dan masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap keputusan dan kinerja pemerintah. Tanpa kebebasan informasi fungsi pengawasan tidak akan efektif. Berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut⁸.

Transparansi artinya terbuka, menandakan bahwa pengelolaan dana madrasah memang harus bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Terbuka untuk dapat mengetahui apa yang telah dilakukan madrasah dengan dana tersebut dan manfaat yang dirasakan. Dengan adanya transparansi, pengelolaan danapun akan terkontrol. Tidak akan ada penyelewengan atau tindakan penggelapan dana madrasah karena semua turut mengawasi bagaimana dana tersebut dikelola.⁹

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Dalam hal ini madrasah harus akuntabel, artinya melakukan pertanggungjawaban kepada pihak stakeholder baik internal maupun eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana madrasah. Hal tersebut dikarenakan dana madrasah berasal dari berbagai pihak yakni pemerintah dan orang tua siswa serta pihak-pihak lainnya. Akuntabilitas yang dilakukan oleh madrasah harus baik karena akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa madrasah sebagai pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik. Madrasah yang melakukan pengelolaan dana yang baik sudah tentu akan akuntabel¹⁰.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut¹¹. Menurut Asmani, terdapat tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya transparansi para penyelenggara madrasah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola madrasah.
2. Adanya standar kinerja, disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
3. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap madrasah. Kepercayaan publik yang tinggi akan madrasah dapat

⁸ Marinah, Abdullah, and Saleh.

⁹ Yunita and Perdanawati, "Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Min) Klungkung."

¹⁰ Yunita and Perdanawati.

¹¹ Marinah, Abdullah, and Saleh, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Sekolah."

mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula dalam pengelolaan manajemen madrasah. Madrasah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat.¹²

Tujuan Penerapan Model Transparansi dan Akuntabilitas di Manba'ul Huda

Pada studi bidang manajemen pendidikan transparansi merupakan salah satu komponen yang memiliki banyak manfaat terutama bagi suatu lembaga pendidikan bahkan bagi para pemangku kepentingan. Transparansi ini menjadi penting karena dapat membangun kepercayaan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Transparansi ini dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan beberapa informasi yang dinilai perlu disampaikan dan dianggap beberapa pihak perlu mengetahui informasi tersebut demi menjaga kepercayaan dengan keterbukaan data dan informasi. Tujuan dari adanya transparansi di lembaga pendidikan salah satunya yaitu meminimalisir potensi pemicu konflik yang bisa saja muncul dipermukaan akibat dari ketidakjelasan suatu informasi dari pihak terkait¹³.

Transparansi yang dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana adanya keterbukaan dalam hal pelayanan publik yang dapat diakses oleh seluruh pihak. Pada dasarnya transparansi ini merupakan salah satu model yang diterapkan dalam pengelolaan pembiayaan guna tidak adanya kecurigaan terhadap salah satu pihak dan pihak yang memiliki kepentingan pun dapat mengakses data atau informasi sehingga dapat dipahami serta dipantau. Mengenai transparansi setidaknya hal ini terdapat tiga indikator yaitu (1) Terdapat kerangka kerja hukum atau tidak bagi transparansi, (2) Masyarakat memiliki akses terhadap transparansi anggaran, (3) Terdapat pelaksanaan atau audit yang jelas, mandiri, dan efektif¹⁴.

Selain transparansi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan diperlukan akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban, dalam bidang studi manajemen pendidikan akuntabilitas mencakup beberapa aspek misalnya akuntabilitas terhadap hasil belajar siswa, transparansi dalam manajemen pembiayaan, dan evaluasi kerja secara komprehensif. Salah satu dengan diterapkannya akuntabilitas dalam lembaga pendidikan yaitu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, secara langsung akuntabilitas ini membantu lembaga khususnya lembaga pendidikan untuk dapat berfokus pada hasil belajar peserta didik di mana hal tersebut juga dapat mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, akuntabilitas juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dari sumber daya termasuk anggaran.¹⁵

¹² Marinah, Abdullah, and Saleh.

¹³ Muh Ibnu Sholeh, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Membangun Citra Positif Melalui Manajemen Pendidikan Yang Berkualitas," *Tadbiruna* 3, no. 1 (2023): 46, <https://doi.org/https://doi.org/10.51192/tadbiruna.v3i1.622>.

¹⁴ Ni Luh Tina Yanti, "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Di Smp N 3 Sukawati Dalam Program Rkas," *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 3 (2021): 143, <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1805>.

¹⁵ Sholeh, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Membangun Citra Positif Melalui Manajemen Pendidikan Yang Berkualitas," 49.

Prinsip-prinsip Dasar Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Indikator kunci dari prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah adanya keterbukaan informasi kepada publik perihal pengelolaan dana operasional madrasah, baik yang berasal dari pemerintah, orang tua ataupun sumber dana lainnya.

Untuk memenuhi prinsip dasar transparansi, pihak madrasah harus memberikan informasi tentang pengelolaan dana pendidikan secara terbuka, jelas dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi dapat diwujudkan dengan:

- a. menggunakan sistem informasi terintegrasi untuk mencatat transaksi keuangan.
- b. mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses.
- c. memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya kepada publik.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah bahwa pihak madrasah harus bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana madrasah, baik internal maupun eksternal. Proses pembuktian akuntabilitas adalah dengan tersedianya laporan pertanggungjawaban dari pihak madrasah kepada pemberi sumber dana pendidikan, baik pemerintah maupun orangtua. Jika dipandang perlu, laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diaudit oleh auditor internal pemerintah, seperti inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun oleh auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun aparat penegak hukum.

Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah pada madrasah, pengelolaan dana BOS adalah proses atau kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan madrasah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan, sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka membantu meringankan pembiayaan program pendidikan demi tuntasnya wajib belajar 9 tahun yang diprogramkan oleh pemerintah melalui program dana BOS yang dikelola madrasah. Adapun pelaksanaan pengelolaan dana BOS meliputi penyaluran dana BOS oleh Direktorat KSKK, pencairan dana BOS oleh madrasah, penggunaan dana BOS oleh madrasah dan pelaporan dana BOS oleh madrasah.

Mekanisme Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di MI Manba'ul Huda

Mengelola pembiayaan pendidikan juga terdapat mekanisme yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pendidikan, di mana hal tersebut bertujuan untuk menetapkan keputusan dalam pembiayaan pendidikan. Sebelumnya pihak lembaga pendidikan melibatkan warga sekolah atau madrasah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para pendidik, dan *stakeholder* maupun para orang tua dari peserta didik yang diwakilkan oleh komite madrasah.¹⁶ Dari hasil wawancara dengan kepala

¹⁶ Rini Wahyuni Siregar, Amiruddin Siahaan, and Inom Nasution, "Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Melalui Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan Di Mts Se Kecamatan Sei Suka

madrasah yang menyatakan bahwa mekanisme dalam penyusunan anggaran ini melibatkan beberapa pihak, seperti para pendidik, orang tua peserta didik dan tentunya bendahara madrasah. Kemudian pihak madrasah menyampaikan informasi terkait biaya pendidikan kepada orang tua melalui rapat yang dilaksanakan di awal tahun ajaran baru dan disetiap beberapa bulan saat akan dilaksanakan kegiatan madrasah. Untuk biaya yang bersifat rehab dan pembangunan pihak madrasah menginformasikan rencana pembangunan tersebut dengan kebutuhan biaya yang diperlukan di awal tahun ajaran baru. Hal ini disampaikan guna para orang tua dapat melihat progress dari perputaran uang yang masuk ke madrasah digunakan untuk menunjang fasilitas, sarana dan prasarana madrasah itu sendiri dan mendukung proses kegiatan pembelajaran peserta didik.

“Tentunya untuk menyusun anggaran atau dana terutama yang dari BOS ya, kita libatkan lagi para guru di sekolah ini. Karena guru-guru di sini juga yang membutuhkan itu, misalnya dibagian sarana prasarana. Kami pihak sekolah bertugas dan berusaha untuk memenuhi fasilitas untuk menunjang pembelajaran siswa di kelas. Biasanya juga kami selalu informasikan ke guru-guru, kira-kira apa aja yang dibutuhkan dan apa yang harus diganti/diperbaharui untuk kegiatan bapak atau ibu guru. Anak-anak juga supaya lebih nyaman. Selain itu juga kami adakan rapat dengan orang tua dari para siswa yang sekolah di sini. Kita dengarkan masukan dan saran yang diberikan kepada sekolah. Ngga jarang juga mereka (para orang tua) itu ikut membantu atau mendukung program sekolah”¹⁷

Tidak hanya berfokus dalam pengalokasian dana madrasah yang digunakan, setelah pihak madrasah menyalurkan dana ke dalam bentuk barang yang diperlukan dalam proses pembelajaran selanjutnya bendahara madrasah akan segera melaporkan setiap pembelanjaan yang dilakukan dengan dana BOS itu ke dalam aplikasi Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (ERKAM). Sebelumnya pihak bendahara madrasah menyusun dan merencanakan penganggaran dana pada aplikasi EDM atau Evaluasi Diri Madrasah, kemudian dilakukan pembelanjaan, dan setelah itu dicatat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban.

Adanya aplikasi ERKAM yang berperan sebagai pengawasan pelaporan anggaran biaya pendidikan di lembaga pendidikan untuk meninjau dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh madrasah. Kegiatan tersebut diawasi oleh pemerintah, dan sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas madrasah melakukan pencatatan di dalam aplikasi ERKAM. Selanjutnya laporan penggunaan dana pendidikan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Hal tersebut ditujukan agar setiap dana yang digunakan dapat dialokasikan sesuai dengan rencana serta waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan di madrasah itu biasanya pengawas madrasah juga ikut melakukan pemantauan. Misalnya dalam kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Madrasah (PKKM) para pengawas melakukan pemantauan dan memastikan bahwa madrasah telah melakukan

Kabupaten Batu Bara,” *Research and Development Journal of Education* 9, no. 1 (2023): 75, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v9i1.14208>.

¹⁷ Wawancara Kepala Madrasah MI Manba'ul Huda Selasa, 10 Desember 2024 10.15 WIB

kewajiban dengan menggunakan dana pendidikan sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan kebutuhan. Menurut dari hasil wawancara dengan salah satu guru di MI Manba'ul Huda yang menyatakan bahwa:

“Setiap tahun itu pasti kita diminta untuk selalu update dan dimintain kelengkapan berkas untuk pencairan dana BOS. Alhamdulillahnya setiap berkas yang diperlukan itu selalu ada minimal jika belum ada bukti fisiknya itu sudah ada data yang bersifat administrative di dalam laptop masing-masing. Terkecuali berkas yang dalam bukti fisik juga ada. Kita kalau melakukan pembelian yang berhubungan dengan kegiatan sekolah pasti untuk kwitansinya itu selalu ada, dan disimpan di bagian TU dikumpulkan biar gak berceceran, nanti setiap diperlukan atau ditanyakan itu bisa langsung nunjukin buktinya. Jadi sejauh ini sih sudah bisa dibilang tertib aja.”¹⁸

Tantangan dalam Menerapkan Model Transparansi dan Akuntabilitas di MI Manba'ul Huda

Tantangan dalam menerapkan model transparansi serta akuntabilitas memang jelas diperlukan, karena hal tersebut untuk menjaga kredibilitas dari suatu lembaga pendidikan serta menjaga kepercayaan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas memang memerlukan biaya, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan pembiayaan di madrasah. Mengelola keuangan dapat dilakukan dengan manajemen biaya yang baik di dalam madrasah tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperoleh peluang sumber pendanaan bagi beberapa program di sekolah, selain itu agar penggunaan biaya madrasah juga efektif, dan membuat sebuah laporan pengeluaran keuangan yang transparan dan juga akuntabel¹⁹.

“Kendalanya sih sebenarnya bukan perihal dana tidak ada atau yang lainnya. Hanya usaha kita untuk transparan dan akuntabel itu terkadang terkendala disaat pembelanjaan. Rencana yang sudah dibuat dengan memperhatikan evaluasi diri madrasah itu kita kan udah nganggari barang apa dan sudah survei harganya berapa. Cuma nanti ada aja harganya yang berbeda atau di dalam aplikasinya itu tidak ada komponennya dan sebenarnya ada banyak lagi aturan yang ditetapkan untuk membelanjakan dana pendidikan itu, jadi ngga seenaknya punya uang banyak terus belanja aja tanpa memperhatikan prioritas. Kita pasti selalu diskusikan ini dengan guru-guru bahkan saat rapat dengan para orang tua siswa”

Akuntabilitas kinerja madrasah yaitu sebagai bentuk dari pertanggung jawaban lembaga pendidikan dalam menjalankan kegiatan kepada warga madrasah. Akuntabilitas ini juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas pelaporan terhadap sebuah program dengan memperhatikan alur kegiatan dimulai dari input, kemudian prosesnya, hingga sampai pada output. Akuntabilitas pembiayaan juga bertujuan untuk menilai bagaimana capaian dari kinerja madrasah dan juga kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang dilakukan oleh pihak madrasah kemudian mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan²⁰.

¹⁸ Wawancara Pendidik MI Manba'ul Huda Selasa, 10 Desember 2024 11.05 WIB

¹⁹ Nono Hery Yoenanto, “Strategi Pendidikan Dasar Untuk Mencapai Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan,” *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 114, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jdmp.v7n2.p115-120>.

²⁰ Yoenanto, 115.

KESIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini ditujukan karena transparansi adalah sebagai bentuk keterbukaan dari pihak lembaga pendidikan kepada warga madrasah terhadap beberapa aspek termasuk dalam penggunaan dana pendidikan. Setelah transparan dalam hal pendanaan pendidikan maka harus bersikap akuntabel yaitu dengan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan atau program yang dilakukan itu sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. Transparansi dan akuntabilitas ini perlu diterapkan di lembaga pendidikan guna menjaga kepercayaan warga madrasah terhadap pihak madrasah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdi, W P. "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 19, no. 4 (2013): 565-78. <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>.
- Marinah, Marinah, Muhammad Ruslan Abdullah, and Mahadin Saleh. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Sekolah." *Kelola: Journal of Islamic Education Management* 8, no. 1 (2023): 79-92. <https://doi.org/10.24256/kelola.v8i1.3746>.
- Nurmalasari, Inten, Zamzam Lukmanul Jamil, and Ara Hidayat. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Di Bandung." *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 1-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.26594/dirasat.v5i1.1626>.
- Riski, Aulia. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia," 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/2pcs4>.
- Sholeh, Muh Ibnu. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Membangun Citra Positif Melalui Manajemen Pendidikan Yang Berkualitas." *Tadbiruna* 3, no. 1 (2023): 43-55. <https://doi.org/https://doi.org/10.51192/tadbiruna.v3i1.622>.
- Siregar, Rini Wahyuni, Amiruddin Siahaan, and Inom Nasution. "Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Melalui Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan Di Mts Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara." *Research and Development Journal of Education* 9, no. 1 (2023): 73-79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v9i1.14208>.
- Yanti, Ni Luh Tina. "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Di Smp N 3 Sukawati Dalam Program Rkas." *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 3 (2021): 139-51. <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1805>.
- Yoenanto, Nono Hery. "Strategi Pendidikan Dasar Untuk Mencapai Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan." *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 115-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jdmp.v7n2.p115-120>.
- Yunita, Ria, and Luh Putu Virra Indah Perdanawati. "Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Min) Klungkung." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*

Equilibrium 6, no. 2 (2020): 238-53.
https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v6i2.434.

Zarkasyi, Zulfahmi Syukri. "Akuntansi Biaya: Konsep Dasar Perhitungan Pembiayaan Pendidikan." ANTOLOGI PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM, n.d., 87.